

# STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Firda Rizky Ananda<sup>1</sup>, Eko Priyo Purnomo<sup>12\*</sup>, Aqil Teguh Fathani<sup>3</sup>, Lubna Salsabila<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Khon Kaen University, Thailand

<sup>3</sup>E-Governance and Sustainability Institute Yogyakarta, Indonesia

\*e-mail: [eko@umy.ac.id](mailto:eko@umy.ac.id)

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguraikan upaya pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebakaran hutan dan lahan terjadi pada tahun 2019 dan menyebabkan banyak dampak terhadap ekosistem alam, satwa, lingkungan, udara dan kesehatan masyarakat. Kasus yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan yang memakan banyak korban dan derita warga di Kotawaringin Barat. Pada kasus ini masyarakat berharap pemerintah dapat mengatasi dengan cepat agar kasus kebakaran hutan dapat berkurang, sehingga kedepannya Kotawaringin Barat dapat terbebas dari polusi kabut asap kebakaran yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit pernapasan pada bayi, anak-anak, dewasa bahkan lanjut usia. Metode penelitian kualitatif eksploratif dengan data sekunder dilakukan untuk menguraikan dan mendeskripsikan penelitian. Data dikumpulkan dari jurnal, buku dan media online terkait kebakaran hutan di Kotawaringin Barat. Teknik analisis dilakukan dengan mode interaktif yang dirangkai berdasarkan alur pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Tiga upaya itu terdiri dari, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, patroli terpadu pencegahan karhutla, serta pelatihan dasar penanggulangan bencana karhutla. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Namun, dari ketiga upaya yang dilakukan ada yang belum efektif yaitu kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan karena faktor geografis dan kebiasaan masyarakat yang sulit untuk di awasi. Dalam penelitian ini, upaya dari Pemerintah Kabupaten dalam menanggulangi bencana Karhutla dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi terdapat beberapa isu yang masih menjadi kendala untuk kebaikan hutan kedepannya di Provinsi Kalimantan Tengah.

**Kata Kunci:** Kebakaran Hutan dan Lahan; Mitigasi; Kotawaringin Barat; Upaya Pemerintah

## Abstract

This study analyzes and describes the government's efforts to combat forest and land fires in the West Kotawaringin Regency. In 2019, forest and land fires occurred, wreaking havoc on natural ecosystems, animals, the environment, the air, and public health. Cases that occurred due to the forest and land fires claimed numerous lives and wreaked havoc on West Kotawaringin. In this case, the community hopes that the government will act quickly to contain forest fires, allowing West Kotawaringin to be free of fire haze pollution in the future, which can cause a variety of respiratory diseases in infants, and children, adults, and even the elderly. Qualitative exploratory research methods using secondary data were used. Data on forest fires in West Kotawaringin were gathered from journals, books, and online media. The analysis was conducted in an interactive mode and was organized according to data collection flow, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings of this study indicated that the West Kotawaringin Regency Government made three efforts to combat forest and land fires. The three efforts are as follows: socialization of forest and land fire prevention, integrated patrols for forest and land fire prevention, and basic training for forest and land fire disaster management. The findings of this study indicate that the West Kotawaringin Regency Government has taken steps to prevent forest and land fires. However, among the three efforts, some have been ineffective, namely socialization activities aimed at preventing forest and land fires due to geographical factors and difficult-to-monitor community habits. While this study demonstrates that the Regency Government's efforts for resolving the Karhutla disaster are reasonable, in reality. However, several issues still impede the future health of the forest in Central Kalimantan Province.

**Keywords:** Forest and Land Fires; Mitigation; West Kotawaringin; Government Efforts

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



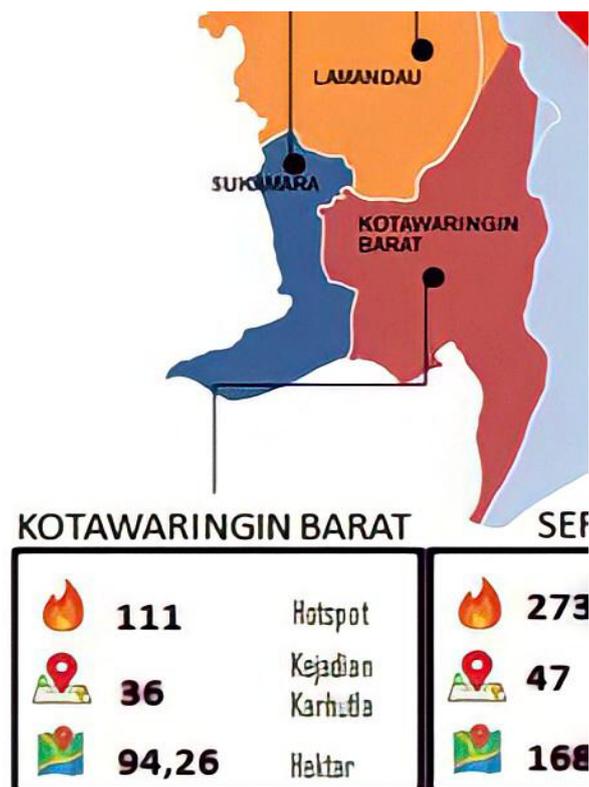
## PENDAHULUAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguraikan upaya pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebakaran hutan dan lahan terjadi pada tahun 2019 dan menyebabkan banyak dampak terhadap ekosistem alam, satwa, lingkungan, udara dan kesehatan masyarakat. Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu wilayah yang sangat terdampak karena bencana kebakaran hutan dan lahan (Sepriando et al., 2020). Kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu fenomena yang di tandai dengan munculnya musim kemarau Panjang di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan yang menyebabkan kekeringan (Sawerah et al., 2016; Wibowo, 2009).

Jumlah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia kembali marak, tidak sedikit setidaknya sepanjang tahun 2019 merupakan tahun yang berdampak buruk untuk warga Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Banyak kasus terjadi akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang semakin hari memakan banyak korban dan

derita warga setempat. Pada kasus ini masyarakat berharap pemerintah dapat mengatasi dengan cepat agar tahun-tahun kedepannya Kotawaringin Barat terbebas dari kabut asap yang menyebabkan berbagai macam penyakit pada bayi, anak-anak, dewasa bahkan lansia.

Di hutan Kalimantan Tengah sendiri salah satu jenis tanah yang ada di hutan tersebut adalah tanah gambut yang merupakan ekosistem yang rapuh dan mudah terkena panas sehingga besar kemungkinan untuk terjadi kebakaran (PG, 2021; Waluyo et al., 2019). Penebangan pohon di hutan gambut mengakibatkan daya serap permukaan tanah berkurang, kondisi ini menyebabkan terjadinya banjir di musim penghujan dan sebaliknya pada musim kemarau lahan gambut akan lebih mudah terbakar (Sawerah et al., 2016; Suhendri & Purnomo, 2017). Lahan gambut sangat rentan terbakar hal itu dikarenakan gambut mengandung bahan organik, memiliki sifat porous (gembur) dan yang menyebabkan kebakaran pada lahan gambut menjadi sulit dipadamkan yaitu karena api dapat menjalar di bawah permukaan lahan gambut (Wibowo, 2009).



Gambar 1. Peta Kebakaran Hutan di Kalimantan Barat

Pada tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Terdapat kurang lebih 111 titik api di 36 lokasi. Tercatat 6 kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu: Arut Selatan sebanyak 17 titik api, Arut Utara 20 titik api, Kotawaringin Lama sebanyak 25 titik api, Kumai 15 titik api, Pangkalan Lada 15 titik api dan juga Pangkalan Banteng 19 titik api. Dampak dari hal tersebut kurang lebih 94,26 hektar lahan terbakar, dengan rata-rata lahan tersebut ialah lahan gambut.

Kondisi hutan dan lahan di Indonesia sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945 telah mengalami degradasi dan deforestasi, bahkan mengalahkan Brasil dalam deforestasi atau penebangan hutan tertinggi di dunia (Sinaga, 2021). Undang-undang No. 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa hutan merupakan anugerah Tuhan yang wajib disyukuri, dilestarikan dan dikelola sehingga dapat memberikan manfaat kepada manusia. Dengan melihat arti pentingnya kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan yang diharapkan memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup orang banyak, maka keberadaan hutan harusnya dipertahankan secara optimal. Kerusakan hutan adalah salah satu persoalan terbesar yang harus ditangani oleh Indonesia. Isu global membawa agar Indonesia harus mampu melakukan upaya maksimal untuk mencegah dan menjaga hutan yang ada di Kalimantan khususnya. Salah satu isu global yang paling diperhatikan oleh dunia internasional adalah lingkungan hidup. Salah satu komponen di dalamnya adalah hutan. Alasan isu ini menjadi begitu penting dan segera harus ditangani.

Seperti telah kita ketahui, bahwa hutan merupakan paru-paru bumi dan tempat berlindung satwa, pohon-tumbuhan sumber daya alam mineral, sumber daya alam yang bisa didapatkan dari hutan yang tidak ternilai harganya bagi kehidupan manusia (Pinem, 2016). Hutan juga merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar untuk kesejahteraan manusia, baik manfaat yang dirasakan secara langsung, maupun yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat langsung seperti penyediaan kayu, satwa, dan hasil tambang. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata air, pencegahan erosi. Kerugian yang diakibatkan dari rusaknya hutan sangat

tinggi bukan hanya secara ekonomis tetapi juga secara ekologis dan sosial (Ratnaningsih & Prastyaningsih, 2017).

Pemicu kebakaran ini juga adanya Peraturan Gubernur no. 15 tahun 2010 yang memberikan kebijakan pembakaran lahan pada warganya maksimal 1 hektar. Hal ini menjadi salah satu penyebab masyarakat melakukan perluasan lahan dengan cara membakar secara bersamaan sehingga api susah dikendalikan. Namun lain halnya dengan yang terjadi di Provinsi Riau. Dikatakan bahwa Dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pemerintah daerah Provinsi Riau membuat peraturan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan atau PUSDALKARHUTLA. Peraturan ini dibuat oleh berdasarkan arahan dari Gubernur Riau No. 11 Tahun 2014 yang isinya menghimbau setiap masyarakat atau perusahaan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Kewenangan yang dimiliki oleh PUSDAKARHUTLA adalah melakukan pengawasan, penindakan, pembinaan kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan (Purnomo et al., 2019; Purnomo, Ramdani, et al., 2021; Trianisa et al., 2020). Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa besarnya dampak dan kerugian yang ditimbulkan dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat"

Menurut Salikhan (2016) bahwa kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia seolah menjadi rutinitas tahunan dalam dua puluh tahun terakhir, pemerintah seolah tidak mampu dan tidak berdaya menghadapi bencana tersebut. Akibatnya adalah upaya yang dilakukan selama ini seperti kebijakan untuk melindungi dan menyelamatkan hutan terkesan percuma dan membuang anggaran alokasi negara (Agustiyara et al., 2021; Zuchriyastono & Purnomo, 2020).

Upaya yang telah dilakukan pengambil kebijakan terkait untuk

melindungi kebakaran hutan diantaranya adalah melakukan langkah preventif dengan mensiagakan aparat keamanan hutan dan menggunakan satelit teknologi untuk mendeteksi titik-titik api di daerah yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan (Effendi & Purnomo, 2020; Firmansyah et al., 2021; Khairunnisa et al., 2020). Namun demikian, hal itu tidaklah cukup optimal dalam memerangi permasalahan kebakaran hutan karena kecenderungan kebakaran hutan secara forecast atau ramalan mengalami kenaikan. Ada dua pilihan reformulasi kebijakan yang direkomendasikan, yaitu modifikasi kebijakan seperti menambah ataupun mengurangi undang-undang yang tidak tepat sasaran dan meningkatkan pengawasannya; dan kebijakan baru dengan merubah semua aturan misalnya pelarangan land clearing dengan membakar hutan disertai dengan hukuman yang tegas bagi pembakar hutan hal ini juga termasuk bagi pelaku maupun aktor intelektualnya (Purnomo, Ramdani, et al., 2021).

Menurut Cahyono et al., (2015b), kebakaran hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan dan kehutanan yang krusial serta menjadi perhatian lokal dan global. Upaya penanggulangannya sudah lama dilakukan tetapi keberhasilannya relatif rendah hal ini dapat ditemukan pada kasus-kasus kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan yang setiap tahun menjadi bencana rutin dan bahkan luas kebakaran terus meningkat. Dari sudut pandang lain lemahnya pengawasan kelambaman birokrasi, korupsi, tata lembaga tumpang tindih dan tata kelola pemerintahan yang tidak cermat dalam mengelola hutan menyebabkan kebakaran terus meningkat (Purnomo, Ramdani, et al., 2021). Akibatnya adalah terjadinya polusi udara setiap tahun terus meningkat yang menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat. Asap dari kebakaran mengandung unsur-unsur Sulfur Oksida, partikulat SO<sub>4</sub> = dan asap membahayakan kesehatan penghuni, dan juga menurunkan jumlah curah hujan. Hasil observasi oleh BMG (Institute of Meteorologi dan Geophysical di Indonesia) pada konsentrasi = dan asap dalam kebakaran hutan untuk bulan September 1997 di polutan Sulfur Oksida, partikulat SO<sub>4</sub> Kalimantan dan Sumatera menunjukkan peningkatan hingga 700%

asap polutan, 313% kation molekul NH<sub>4</sub><sup>++</sup>, Ca<sup>+</sup>, Mg<sup>++</sup> dan 540% anion Cl<sup>-</sup>, NO<sup>-</sup> dan SO<sub>4</sub>— Dan UPTHB, BPPT untuk melakukan hujan untuk menyebarkan asap.

Kebakaran masih terus berulang dan menyebabkan masalah materiil maupun sosial, hal ini karena penanganan kebakaran hutan dan lahan lebih dititikberatkan pada upaya represif daripada upaya preventif (Muazaroh et al., 2021; Wahyuni & Qodir, 2021). Untuk itu, kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan perlu dievaluasi kembali dalam upaya mencari solusi terbaik dalam menghindari kebakaran hutan dan lahan, antara lain dengan cara mereformasi kebijakan pengelolaan hutan dan lahan; mengkaji ulang izin pemanfaatan lahan, terutama pada lahan gambut; menyelesaikan persoalan sengketa lahan; memberdayakan masyarakat; dan menegakkan hukum. Selain itu perlu adanya upaya pemberdayaan masyarakat pengguna lahan agar tidak membakar hutan dan menemukan cara baru yang tidak merusak lingkungan (Asmin, 2018; Asyiah et al., 2021).

## **METODE**

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif eksploratif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Azmi et al., 2021; Purnomo, Fathani, et al., 2021; Satispi et al., 2021).

Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana upaya Pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Lokasi penelitian Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan pada penelitian ini, data tersebut berasal dari laporan media-media lokal dan nasional terkait kebakaran hutan dan lahan di Kotawaringin Barat, jurnal-jurnal, buku, media online dan website. Selanjutnya tahap akhir dari data, penelitian melakukan konfirmasi dengan meninjau langsung strategi yang diterapkan oleh pemerintah

daerah melalui telepon seluler dan perangkat whatsapp agar penelitian ini lebih detail dan spesifik sesuai dengan realita dilapangan. Selanjutnya dalam menganalisis data penelitian menggunakan teknik interaktif dan double screening agar dapat lebih spesifik menyajikan data, menarik kesimpulan dan memberi saran untuk penelitian selanjutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB), bapak Williem Rampangilei yang didampingi oleh Bapak Medi Herlianto selaku Direktur Kesiapsiagaan BNPB telah melaksanakan rapat koordinasi penanganan Karhutla yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 11 Agustus 2019. Menurut Kepala BNPB, mengatakan bahwa pemerintah pusat akan melakukan pendampingan berupa dukungan anggaran, peralatan, dan teknis, dan untuk bantuan-bantuannya akan di salurkan melalui helikopter.

BPBD Kotawaringin Barat bekerja sama dengan TNI dan POLRI untuk melakukan operasi pemadaman karhutla. Menurut Bapak Hermon selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat, Karhutla pada tahun 2019 ini tidak separah dengan Karhutla pada tahun 2015, karena mulai bulan Juni siaga pengendalian Karhutla sudah ditetapkan dengan melakukan sosialisasi, pemadaman titik api, dan penegakkan hukum bagi pelaku Karhutla.

Kotawaringin Barat merupakan salah satu Kabupaten terluas di Kalimantan Tengah dengan luas wilayah mencapai 765.096.94 Ha, dengan kawasan hutan 615,529.69 Ha dan Kawasan Non Hutan 149,567.26 Ha. sehingga apabila terjadi bencana kebakaran hutan dan Lahan dapat menimbulkan dampak yang sangat besar seperti kerusakan Lingkungan, Kerugian sektor ekonomi serta terhambatnya akses transportasi.

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat telah menjadi bencana tahunan. Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan terjadinya kekeringan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berkepanjangan menimbulkan dampak yang buruk bagi kegiatan sehari-hari masyarakat contohnya

seperti, aktivitas pelayanan publik, aktivitas ekonomi, dan kesehatan masyarakat (Cahyono et al., 2015a). Dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berupa kegiatan-kegiatan seperti, melakukan sosialisasi ke daerah rawan terjadinya kebakaran, dan mengadakan patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan disebabkan oleh aktivitas manusia atas sadar pertimbangan ekonomi. Kebakaran lahan juga dipengaruhi oleh faktor sosial, masyarakat yang ditemui memiliki kontak sosial yang rendah seperti pada kasus kebakaran ini kepedulian masyarakat untuk melaporkan kejadian kebakaran tersebut pada pihak berwajib masih kurang (Sawerah et al., 2016).

Sepanjang kebakaran terjadi, Kotawaringin Barat diselimuti kabut asap yang tebal yang mengganggu aktivitas warga karena jarak pandang yang terbatas. Kabut asap juga berakibat 2.000 warga terkena penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Tengah. Sedangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat, sejak bulan Agustus warga yang terkena penyakit Ispa hingga berjumlah 4.000 orang, dan jumlah tersebut lebih besar daripada pengidap penyakit Ispa pada tahun 2015 yang berjumlah 767 orang (news.okezone.com). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat warga yang menderita penyakit ISPA rata-rata berumur 1-19 tahun. Sulkan sebagai Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular mengatakan “ ya sudah 4.000 an lebih berdasarkan data kami sejak Agustus dan pekan kedua September 2019. Angka ini naik signifikan jika dibandingkan data bulan Januari-Juli”. Akibat kondisi yang semakin memburuk, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Keolahragaan (DISDIKPORA) meliburkan aktivitas ajar mengajar sampai kondisi di Kabupaten Kotawaringin Barat benar-benar berkurang. Sebelum meliburkan aktivitas belajar mengajar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Keolahragaan (DISDIKPORA) melakukan pengunduran jam masuk sekolah TK/PAUD,SD/MI dan SMP/MTs yang terdampak asap.

Berikut merupakan kegiatan yang dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan: Sosialisasi

Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan, Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; dan Pelaksanaan pelatihan dasar Penanggulangan bencana karhutla. Pertama, kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan pada beberapa kecamatan dan desa/kelurahan yang dianggap rawan terjadinya karhutla. Berdasarkan Laporan Posko Karhutla Kobar berikut adalah Kecamatan yang dianggap rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan: kecamatan Arut Selatan, kecamatan Arut Utara dan kecamatan Kumai. Sosialisasi ini dilakukan agar memberikan pemahaman mengenai dampak buruk yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan. Adapun target dari sosialisasi ini adalah instansi pemerintahan yang ada di kecamatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Sosialisasi dilakukan pada saat akan memasuki musim kemarau. Inti pokok dari sosialisasi untuk memberikan penjelasan mengenai pentingnya partisipasi masyarakat untuk turut membantu pemerintah mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu sosialisasi juga memberikan penjelasan tentang dampak buruk dari kebakaran hutan dan lahan serta memberikan penjelasan mengenai sanksi bagi pelaku kebakaran (Amalia & Afiff, 2017; Budiana, H. R., Sjoraida, D. F., Mariana, D., & Priyatna, 2016; Sepriando et al., 2020). Dapat dikatakan kegiatan sosialisasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan masih kurang efektif, hal tersebut dikarenakan masih terdapat masyarakat yang melakukan pembakaran. Contohnya seperti, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan membersihkan sampah dengan cara dibakar.

Kedua, Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan. Patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah suatu upaya dalam mengurangi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tingkat Desa/Kelurahan. Kegiatan ini melibatkan satuan tugas yang terdiri dari BPBD Kotawaringin Barat, TNI (Kodim, 1014/PBN), POLRI (Polres Kotawaringin Barat), Manggala Agni (DAOPS III Pangkalan Bun) serta unsur masyarakat Desa/Kelurahan. Patroli terpadu akan dilakukan di beberapa titik yang dianggap rentan terjadinya karhutla, berdasarkan

Laporan Posko Karhutka Kobar berikut adalah 3 Kecamatan dan 8 Desa/Kelurahan yang dianggap sebagai daerah rawan terjadi kebakaran: Kecamatan Arut Selatan terdiri dari 3 Desa/Kelurahan, yaitu: Kelurahan Mendawai Seberang dan Pasir panjang dan Tanjung Putri. Pada kecamatan Kotawaringin Lama terdiri dari 2 kelurahan yaitu kelurahan kotawaringin hulu riam durian; terakhir pada kecamatan Kumai terdiri dari kelurahan kubu, sebuah dan sungai kapitan.

Dalam upaya pencegahan dan pemadaman secara dini berupa patroli terpadu tentu saja terdapat berbagai macam kegiatan dalam pelaksanaan harian patroli terpadu. Berikut adalah kegiatan harian patroli terpadu di Kabupaten Kotawaringin Barat. Berkoordinasi dengan aparat desa, penandaan di area rawan karhutla, sosialisasi kepada masyarakat, pembagian brosur tentang penanggulangan karhutla, pemetaan kondisi desa dari segi fisik dan permasalahan tentang kebakaran hutan dan lahan. Jika ditemukan kejadian karhutla maka dilakukan pemadaman awal, dan memberdayakan potensi desa ([ppid.kemendagri.go.id](http://ppid.kemendagri.go.id)). Kegiatan patroli terpadu yang dilakukan Satuan Tugas pencegahan kebakaran hutan dan lahan Kotawaringin Barat cukup berhasil. Berikut hasil kegiatan patroli terpadu di daerah rawan karhutla: Pemetaan potensi daerah rawan terbakar, Penemuan sumber air, Sosialisasi langsung kemasyarakat dan Melakukan uji serasah dan uji daun tunggal.

Ketiga, Pelaksanaan pelatihan dasar Penanggulangan bencana karhutla. Dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan upaya sistematis dalam mengembangkan pemahaman, upaya yang dibutuhkan berupa pendidikan secara formal atau melalui pelatihan yang nantinya akan menambah pengetahuan anggota pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Suhendri & Purnomo, 2017). Upaya penanggulangan bencana karhutla Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan kegiatan pelatihan dasar penanggulangan bencana karhutla di Sungai Bedaun. Pelatihan ini merupakan suatu bentuk antisipasi awal dalam mengembangkan pengetahuan, kesiapan, serta pemahaman masyarakat Sungai

Bedaun jika terjadi bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan pelatihan dasar penanggulangan bencana karhutla dilakukan di Aula Kantor Desa Sungai Bedaun pada tanggal 23 Januari 2019, kegiatan itu dihadiri anggota Linmas Sungai Bedaun dan perangkat desa. Materi pelatihan di sampaikan oleh 3 personil BPBD Kotawaringin Barat dan 2 anggota Manggala Agni DAOPS Pangkalan Bun.

Terdapat beberapa materi pada pelatihan dasar ini, materi pertama tentang ilmu pengetahuan bencana kebakaran hutan dan lahan. Materi kedua tentang pengenalan dan praktik penggunaan alat pemadam kebakaran seperti, Mesin Pompa Air, Nozzle, Selang, dan Handtools ([bcbd.kotawaringinbaratkab.go.id](http://bcbd.kotawaringinbaratkab.go.id)).

Pelatihan dasar penanggulangan bencana karhutla di Desa Sungai Bedaun di nilai cukup berhasil karena dengan adanya pelatihan ini anggota Linmas dan perangkat desa Sungai Bedaun memiliki pengetahuan yang lebih tentang bencana kebakaran hutan dan lahan serta mengerti bagaimana cara menggunakan alat pemadam kebakaran yang baik dan benar.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 di Kotawaringin barat terbagi menjadi 3 kegiatan yaitu Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan pada beberapa kecamatan dan desa/kelurahan yang di anggap rawan terjadinya karhutla, Patroli terpadu pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah suatu upaya dalam meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan di tingkat Desa/Kelurahan dan penyelenggaraan kegiatan pelatihan dasar penanggulangan bencana karhutla. Dari tiga upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di atas Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dikatakan kurang efektif karena masyarakat yang menggunakan metode pembakaran masih banyak ditemui, salah satunya adalah membuka lahan dengan cara dibakar. Masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan metode pembakaran dikarenakan adanya Peraturan Gubernur No.15 Tahun 2010 yang isinya memperbolehkan warganya membakar lahan seluas 1 hektar.

Oleh karena hal tersebut, penelitian ini memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah untuk lebih fokus dan serius dalam menjalankan amanah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, khususnya dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu pemerintah dan aktor kepentingan lainnya perlu melakukan evaluasi rutin agar mengetahui secara detail kekurangan yang terjadi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya diperlukan tindakan tegas dan terukur agar masyarakat dapat menaati segala aturan dan takut terhadap sanksi yang akan diberikan. Hasil akhir dari peningkatan upaya pemerintah dan aktor kepentingan akan memberikan dampak baik bagi masyarakat sekitar khususnya dalam mendapatkan udara bersih agar terhindar dari penyakit pernapasan.

Disisi lain penelitian kedepannya diperlukan studi komparasi/perbandingan antara Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah dengan kota/kabupaten provinsi lain yang memiliki luas geografis dan struktur dan sepadan, tujuannya adalah agar mengetahui secara detail masing-masing kekurangan daerah dalam melakukan pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, juga akan meningkatkan upaya dari masing-masing daerah dalam melakukan tindakan tegas dan terukur dalam menjaga lingkungan khususnya menjaga hutan dan lahan dari kebakaran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustiyara, Purnomo, E. P., & Ramdani, R. (2021). Using Artificial Intelligence Technique in Estimating Fire Hotspots of Forest Fires. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 717(1), 012019. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012019>
- Amalia, R. N., & Afiff, S. A. (2017). Dinamika Keberlangsungan Kelompok Pengusul HKm Sepakat, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.22202/mamangan.v6i1.1944>
- Asmin, F. (2018). Konstruksi Modal Sosial Bagi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat: Sebuah Kerangka Konseptual. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 32–45.
- Asyiah, A. K., Sundari, R. S., & Pratama, F.

- F. (2021). Hubungan antara penyalahgunaan narkoba dan seks bebas dengan infeksi menular seksual di tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(2), 237–246.
- Azmi, N. A., Fathani, A. T., Sadayi, D. P., Fitriani, I., & Adiyaksa, M. R. (2021). Social Media Network Analysis (SNA): Identifikasi Komunikasi dan Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Twitter. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 5(4), 1422–1430.  
<https://doi.org/10.30865/mib.v5i4.3257>
- Budiana, H. R., Sjoraida, D. F., Mariana, D., & Priyatna, C. C. (2016). The Use of Social Media by Bandung City Government in Increasing Public Participation. *International Conference on Communication, Culture and Media Studies (CCCMS)*, 1, 63–70.
- Cahyono, S. A., P Warsito, S., Andayani, W., & H Darwanto, D. (2015a). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Implikasi Kebijakannya. *Jurnal Sylva Lestari*, 3(1), 103.  
<https://doi.org/10.23960/jsl13103-112>
- Cahyono, S. A., P Warsito, S., Andayani, W., & H Darwanto, D. (2015b). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Implikasi Kebijakannya. *Jurnal Sylva Lestari*, 3(1), 103.  
<https://doi.org/10.23960/jsl13103-112>
- Effendi, G. N., & Purnomo, E. P. (2020). Collaboration Government and CSR A Case Study of Suku Anak Dalam in Pompa Air village, Jambi-Indonesia. *International Journal of Academic Research in Business, Arts and Science (Ijarbas.Com)*, 2(1), 19–39.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3632103>
- Firmansyah, R. P., Purnomo, E. P., Kasiwi, A. N., & Sadayi, D. P. (2021). Program Heart of Borneo Wwf Dalam Pelestarian Hutan Di Kalimantan. *Jurnal Hutan Tropis*, 9(1), 94.  
<https://doi.org/10.20527/jht.v9i1.10477>
- Khairunnisa, T., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Upaya Rehabilitasi dan Preventif Pengemis dan Gelandangan. *Journal Moderat*, 6(1), 29–42.
- Muazaroh, L. N., Ruja, I. N., & Wahyuningtyas, N. (2021). Eksistensi kesenian besutan sebagai identitas budaya kabupaten jombang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(2), 206–215.
- PG. (2021). Dampak Kerusakan Lahan Gambut. *Pantaugambut.Id*.  
<https://www.pantaugambut.id/pelajari/dampak-kerusakan-lahan-gambut>
- Pinem, T. (2016). Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut: Kajian Teologi Ekofeminisme. *Gema Teologika*, 1(2), 139.  
<https://doi.org/10.21460/gema.2016.12.219>
- Purnomo, E. P., Fathani, A. T., Setiawan, D., Fadhlurrohman, M. I., & Nugroho, D. H. (2021). Penta-Helix Model in Sustaining Indonesia's Tourism Industry (pp. 477–486).  
[https://doi.org/10.1007/978-3-030-71782-7\\_42](https://doi.org/10.1007/978-3-030-71782-7_42)
- Purnomo, E. P., Ramdani, R., Agustiyara, Nurmandi, A., Trisnawati, D. W., & Fathani, A. T. (2021). Bureaucratic inertia in dealing with annual forest fires in Indonesia. *International Journal of Wildland Fire*.  
<https://doi.org/10.1071/WF20168>
- Purnomo, E. P., Ramdani, R., Agustiyara, Tomaro, Q. P. V., & Samidjo, G. S. (2019). Land ownership transformation before and after forest fires in Indonesian palm oil plantation areas. *Journal of Land Use Science*, 14(1), 37–51.  
<https://doi.org/10.1080/1747423X.2019.1614686>
- Ratnaningsih, A. T., & Prastyaningsih, S. R. (2017). Dampak Kebakaran Hutan Gambut Terhadap Subsistensi Di Hutan Tanaman Industri. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 12(1), 37–43.  
<https://doi.org/10.31849/forestra.v12i1.200>
- Satispi, E., DyasTuti, R. W., Fathani, A. T., & Kaewhanam, P. (2021). Local Government Respond to COVID-19 Pandemics: A Study of South Tangerang City. *Journal of Governance and Public Policy*, 8(2), 82–92.  
<https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i2.11439>
- Sawerah, S., Muljono, P., & Tjitropranoto, P. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal*

- Penyuluhan, 12(1).  
<https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v12i1.11323>
- Sepriando, A., Hartono, H., & Jatmiko, R. H. (2020). Deteksi Kebakaran Hutan dan Lahan Menggunakan Citra Satelit Himawari-8 di Kalimantan Tengah. *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca*, 20(2), 79–89.  
<https://doi.org/10.29122/jstmc.v20i2.3884>
- Sinaga, Y. A. (2021). Kebakaran di hutan Amazon Brazil berkurang pada September. *AntaraNews.Com*.  
<https://www.antaraneews.com/berita/2428861/kebakaran-di-hutan-amazon-brazil-berkurang-pada-september>
- Suhendri, S., & Purnomo, E. P. (2017). Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 174–204.  
<https://doi.org/10.18196/jgpp.4175>
- Trianisa, K., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). Pengaruh Industri Batubara Terhadap Polusi Udara dalam Keseimbangan World Air Quality Index in India The Effect of Coal Industry on Air Pollution in Balance of the World Air Quality Index in India. *Sains Teknologi Dan Lingkungan*, 6(2), 156–168.
- Wahyuni, H., & Qodir, Z. (2021). the Effectiveness of Social Assistance in the Development of Human Resources in Bina Siwi 2018-2020. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(2), 216–225.
- Waluyo, E. A., Ulya, N. A., Martin, E., Rahmat, M., & Nurlia, A. (2019). Penguatan Inovasi dan tata Kelola Lokal Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut Tanpa Bakar. *Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Palembang*, 1, 1–24.
- Wibowo, A. (2009). Peran Lahan Gambut dalam Perubahan Iklim Global. *Jurnal Tekno Hutan Tanaman*, 2 No.1, 19–28.
- Zuchriyastono, M. A., & Purnomo, E. P. (2020). Analisis Lingkungan Lahan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar. Studi Kasus: TPST Piyungan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Dan Lingkungan Hidup*, 5(1), 22–28. [http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/Kesehatan\\_Masyarakat](http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/Kesehatan_Masyarakat)